



UKURAN DEWAN KOMISARIS, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN
PENGAMBILAN RISIKO BANK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
DI INDONESIA

Oleh

Rahmat Setiawan^{*1}, Salsabila Barasyid², Nanda Surya Jatnika³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

E-mail: ^{*1}rahmatsetiawan@feb.unair.ac.id, ²salsabila.barasyid-2014@feb.unair.ac.id,
³nanda.surya.jatnika-2023@feb.unair.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the size of the board of commissioners and the proportion of independent commissioners on bank risk taking. The sample of this study is banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2007 to 2016. The number of observational data analysed was 194 data in the first model and 131 data in the second model. The analysis method used in this research is multiple linear regression. The dependent variables analysed include insolvency risk and idiosyncratic risk. And the independent variables consist of the size of the board of commissioners and the proportion of independent commissioners. The results showed that the size of the board of commissioners and the proportion of independent commissioners had a significant negative effect on bank risk taking as measured by insolvency risk and idiosyncratic risk.

Keywords: *Idiosyncratic Risk, Insolvency Risk, Proportion of Independent Commissioners, Size of the Board of Commissioners*

PENDAHULUAN

Risiko merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas manusia, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam dunia bisnis, risiko menjadi hal yang tidak dapat dihindari, terutama di tengah ketidakpastian lingkungan usaha yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, baik dalam maupun luar negeri. Risiko dalam bisnis berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan, yang apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada kegagalan hingga kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan risiko menjadi krusial dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks keuangan, risiko secara umum merujuk pada ketidakpastian terhadap hasil di masa depan yang bisa menyimpang dari harapan. Risiko ini mencerminkan sejauh mana investor bersedia menerima ketidakpastian

untuk memperoleh imbal hasil. Meskipun definisinya beragam dan belum memiliki kerangka baku, secara umum risiko dibagi menjadi dua jenis: risiko pasar yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal, dan risiko idiosinkratik yang berasal dari faktor internal perusahaan [1]. Setelah risiko pasar dikendalikan, sisanya merupakan risiko idiosinkratik.

Manajemen risiko yang efektif sangat dibutuhkan, terlebih dalam sektor yang memiliki kompleksitas tinggi seperti industri perbankan. Perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian, khususnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kompleksitas usaha dan tingginya eksposur terhadap risiko menjadikan lembaga perbankan harus memiliki sistem pengawasan dan tata kelola yang kuat.



Salah satu mekanisme tata kelola yang penting dalam mengelola risiko perusahaan adalah keberadaan dewan komisaris dan proporsi komisaris independen. Di Indonesia, dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dan ditunjuk melalui RUPS sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Komisaris independen, sebagai pihak luar yang tidak terafiliasi dengan manajemen, memiliki peran penting dalam menjaga objektivitas dan mewakili kepentingan pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.

Sesuai dengan teori agen tipe II, (Astami et al., 2024) berpendapat bahwa struktur dua tingkat memungkinkan dewan komisaris untuk memanfaatkan kumpulan keahlian yang lebih luas guna memantau keputusan perusahaan secara independen dan mengurangi potensi pengambilalihan. Dewan komisaris yang lebih besar memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan manajemen dan memeriksa laporan keuangan dengan lebih ketat [2]. Hal ini dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif sehingga pengambilan keputusan yang berisiko tinggi dapat diminimalkan.

Jika fungsi ini dijalankan secara efektif, maka tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dapat berjalan dengan baik. Praktik tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam mengurangi risiko kredit dengan mendorong kesehatan keuangan yang lebih stabil serta pengambilan keputusan strategis yang lebih bijak oleh dewan direksi dan komisaris. Tata kelola yang efektif menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, salah satunya melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga meningkatkan kelayakan kredit perusahaan [3]. Ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen diyakini berpengaruh terhadap tingkat pengambilan risiko dalam perusahaan. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pengambilan risiko pada sektor perbankan di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji hal serupa. Kohler (2014) menggunakan Z-Score untuk mengukur stabilitas bank [4], sementara Chen (2006) menilai *bank risk taking* menggunakan *idiosyncratic risk* [5]. Penelitian Akbar et al. (2017) di Inggris menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap risiko idiosinkratik dan risiko kebangkrutan [6]. Hal serupa juga diungkapkan oleh Pathan (2009) yang menemukan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kedua jenis risiko tersebut [7].

Namun, di Indonesia, kajian empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen terhadap pengambilan risiko bank masih sangat terbatas. Khususnya studi yang menggabungkan dua pendekatan pengukuran risiko yaitu *accounting-based (insolvency risk)* dan *market-based (idiosyncratic risk)* masih jarang dilakukan. Padahal, data menunjukkan bahwa kedua jenis risiko ini mengalami penurunan pada sektor perbankan Indonesia selama periode 2007–2016.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen terhadap pengambilan risiko bank, dengan menggunakan dua pendekatan pengukuran risiko, yaitu *insolvency risk* dan *idiosyncratic risk*. Objek penelitian difokuskan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007–2016.

LANDASAN TEORI

Board

Struktur dewan dalam perusahaan di Indonesia menganut *two tier system* dimana terdapat pemisahan antara direksi sebagai pengelola dan komisaris sebagai pihak yang



melakukan pengawasan (KNKG,2006). Menurut UU PT Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Menurut POJK nomor 55 tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan dalam teori agensi muncul ketika pemilik perusahaan (prinsipal) menunjuk manajer (agen) untuk mengelola perusahaan serta mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan [8]. Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan ini berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan, di mana manajer dapat bertindak demi kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan pemilik perusahaan [9]. Ketika manajer hanya memiliki sebagian kecil saham, kecenderungan untuk tidak memaksimalkan nilai perusahaan semakin besar. Kondisi ini menimbulkan

agency cost, yaitu biaya yang timbul akibat upaya prinsipal untuk mengawasi agen [8].

Salah satu mekanisme internal utama untuk mengurangi konflik keagenan adalah melalui pengawasan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris berperan penting dalam mengawasi manajemen dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Di Indonesia, masalah keagenan kerap terjadi karena struktur kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi, di mana pemegang saham mayoritas cenderung mendominasi dan berpotensi merugikan pemegang saham minoritas [10]. Oleh karena itu, konflik yang dominan bukan hanya antara pemilik dan manajer, tetapi juga antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Shleifer dan Vishny (1997) menekankan bahwa *good corporate governance* (GCG) merupakan solusi penting dalam meminimalkan konflik ini [11]. Penerapan GCG memungkinkan terciptanya sistem pengawasan yang efektif, mendorong transparansi, dan meningkatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan manajemen sehingga risiko dapat ditekan.

Teori Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan, Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai



lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang memberikan jasa keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan tujuan mensejahterahkan kehidupan rakyat. Diatur dalam Pasal 3 UU No. 10/1998 :“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu [12]. Menurut Horne dan Wachowics (1992) dalam Hartono (2017:257) mendefinisikan risiko sebagai variabilitas *return* terhadap return yang diharapkan [13]. Menurut Sudana (2015:40), risiko adalah penyimpangan hasil sesungguhnya terhadap hasil yang diharapkan [9]. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Bank dalam menjalankan seluruh aktivitasnya dalam memperoleh pendapatan selalu dihadapkan pada risiko.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi

oleh perusahaan khususnya bank dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan.

Bank menghadapi delapan jenis risiko utama yang wajib dikelola sesuai regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 (sebagai amandemen PBI No. 5/8/PBI/2003), bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk delapan jenis risiko: kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan strategis [12]. Risiko-risiko ini mencerminkan potensi kerugian akibat kegagalan debitur, fluktuasi pasar, ketidakmampuan memenuhi kewajiban, gangguan proses internal, pelanggaran regulasi, tuntutan hukum, persepsi negatif publik, serta kesalahan dalam strategi bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang komprehensif menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengambilan Risiko Bank

Di Indonesia menganut *two board system*, yakni ada dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi bertugas melakukan pengelolaan perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada dewan direksi. Oleh karena itu, mekanisme *good corporate governance* di Indonesia dilakukan melalui pengawasan dewan komisaris terhadap dewan direksi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan dewan komisaris terhadap dewan direksi adalah banyaknya jumlah komisaris yang ada di perusahaan. Jumlah komisaris yang ada di dalam perusahaan akan memberikan dampak terhadap keputusan yang diambil oleh anggota direksi.



Seperti beberapa penelitian sebelumnya tentang pengawasan yang dilakukan secara berkelompok menunjukkan dibutuhkan lebih banyak usaha untuk kelompok yang lebih besar dalam mencapai suatu kesepakatan. Masalah koordinasi atau komunikasi kelompok yang lebih besar tidak hanya memperlambat proses pengambilan keputusan, tetapi juga mempengaruhi keputusan yang diambil, karena dibutuhkan lebih banyak negosiasi dan kompromi untuk kelompok yang lebih besar dalam mencapai keputusan akhir.

Moscovici & Zavalloni (1969) mengemukakan bahwa dalam praktik pengawasan yang dilakukan oleh suatu kelompok secara alami menimbulkan diversifikasi pendapat, karena pengawasan yang dilakukan secara individu mengandung kesalahan, tiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memproses informasi, dan hasil pengawasan sebuah kelompok mencerminkan perbedaan pendapat atau menyebabkan heterogenitas pendapat [14]. Ketika jumlah komisaris di dalam suatu perusahaan lebih sedikit, maka heterogenitas pemikiran didalamnya juga akan lebih sedikit. Perspektif pengawasan dari tiap anggota komisaris juga akan menurun karena turunnya heterogenitas pemikiran di dalam perusahaan.

Hal ini akan menyebabkan turunnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap dewan direksi. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap dewan direksi tentunya akan menyebabkan dewan direksi menjadi lebih rentan dalam melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan karena dewan direksi dapat melakukan tindakan *moral hazard* dengan lebih mudah. Ketika tindakan *moral hazard* di dalam perusahaan cenderung tinggi, maka pengambilan keputusan yang berisiko oleh pihak direksi yang ada di dalam bank akan meningkat.

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko bank.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengambilan Risiko Bank

Indonesia menganut *two board system*, yakni ada dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi bertugas melakukan pengelolaan perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada dewan direksi. Oleh karena itu, mekanisme *good corporate governance* di Indonesia dilakukan melalui pengawasan dewan komisaris terhadap dewan direksi. Dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi yakni pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, dewan komisaris lain, anggota direksi serta perusahaan itu sendiri.

Menurut POJK nomor 55 tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Ketika jumlah komisaris independen di dalam suatu perusahaan meningkat, maka akan meningkat pula pengawasan yang dilakukan oleh komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal ini berdampak pada peningkatan objektivitas dan transparansi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

Adanya objektivitas dan transparansi pengawasan oleh dewan komisaris menyebabkan dewan direksi akan cenderung lebih hati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan



berisiko oleh pihak direksi yang ada di dalam bank akan menurun. Fama (1980) menyebutkan bahwa kehadiran komisaris independen diharapkan efektif dalam memantau karena mereka bersifat independen dan akan tertarik untuk melindungi reputasi mereka [15]. Menurut Pathan (2009), komisaris independen akan mendukung investasi pada proyek yang kurang berisiko yang akan membantu perusahaan dalam menghindari kerugian dan dengan demikian akan melindungi citra perusahaan [7]. Oleh karena itu, pengambilan keputusan berisiko di dalam bank juga akan menurun.

H₂: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko bank

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2007-2016. Perusahaan sampel memiliki laporan tahunan dan keuangan disertai data yang lengkap terkait variabel – variabel yang akan digunakan dalam penelitian dalam periode 2007-2016.

Variabel Dependen

Insolvency Risk

Insolvency Risk (Z-Risk) merupakan risiko ketidakmampuan perusahaan untuk membayar klaim jenis apapun pada saat jatuh tempo, yang diukur dengan menggunakan rumus:

$$Insolvency\ risk_{i,t} = \frac{1}{\left[\frac{(ROA_{i,t} + CAR_{i,t})}{\sigma ROA_{i,t}} \right]} i, t \dots (1)$$

Idiosyncratic Risk

Idiosyncratic Risk (IDO) merupakan risiko yang merupakan bagian dari risiko total yang dapat dihilangkan melalui diversifikasi. *Idiosyncratic risk* disebut juga dengan risiko tidak sistematis, yang diukur dengan menggunakan rumus:

$$IDO_{i,t} = \sigma(Residual)_{i,t} \dots (2)$$

Dan dihitung melalui persamaan regresi:

$$R_{i,T} = \alpha_i + \beta_i . R_{mT} + e_{i,T} \dots (3)$$

Variabel Independen

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris (CSIZE) merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan, yang diukur dengan menggunakan rumus:

$$Ukuran\ Dewan\ Komisaris_{i,t} = Ln(Total\ Dewan\ Komisaris_{i,t}) \dots (4)$$

Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen (IND) merupakan besarnya proporsi komisaris independen yang ada di dalam suatu bank., yang diukur dengan menggunakan rumus:

$$Proporsi\ Komisaris\ Independen_{i,t} = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen_{i,t}}{Total\ Dewan\ Komisaris_{i,t}} \dots (5)$$

Variabel Kontrol

Ukuran Bank

Ukuran bank menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh bank, yang diukur dengan logaritma natural total aktiva yang dimiliki perusahaan yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BSIZE_{i,t} = Ln(Total\ Aset_{i,t}) \dots (6)$$

Umur Bank

Umur bank merupakan umur sejak berdirinya suatu bank hingga bank tersebut masih mampu menjalankan operasinya, yang diukur dengan menggunakan rumus:

$$AGE_{i,t} = Tahun\ Berjalan\ Bank_{i,t} - Tahun\ Berdiri\ Bank_{i,t} \dots (7)$$

Market to Book Value Ratio

Market to Book Value Ratio (MtBV) merupakan rasio nilai pasar terhadap nilai buku ekuitas perusahaan yang digunakan untuk mengukur nilai pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan sebagai *going concern*, yang diukur dengan menggunakan rumus:

$$MtBV_{i,t} = \frac{Market\ Value\ of\ Equity\ per\ Share_{i,t}}{Book\ Value\ of\ Equity\ per\ Share_{i,t}} (8)$$



CEO Ownership

CEO Ownership merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh CEO, yang diukur dengan menggunakan rumus

$$CEOWN_{i,t}$$

$$= \% \text{ Saham yang Dimiliki CEO}_{i,t} \dots \dots (9)$$

Model Analisis

Model analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model 1 : Z – Riski,t

$$= \alpha + \beta_1 CSIZE_{i,t} + \beta_2 IND_{i,t} + \beta_3 BSIZE_{i,t} + \beta_4 AGE_{i,t} + \beta_5 MtBV_{i,t} + \beta_6 CEOWN_{i,t} + e_{i,t}$$

Model 2 : IDOi,t

$$= \alpha + \beta_1 CSIZE_{i,t} + \beta_2 IND_{i,t} + \beta_3 BSIZE_{i,t} + \beta_4 AGE_{i,t} + \beta_5 MtBV_{i,t} + \beta_6 CEOWN_{i,t} + e_{i,t}$$

Keterangan :

- α : Intersep persamaan regresi
 $\beta_1 - \beta_6$: Koefisien regresi
 Z-Riski,t : Z-Risk bank i pada tahun t
 IDOi,t : Idiosyncratic risk bank i pada tahun t
 CSIZE_{i,t} : Ukuran dewan komisaris bank i pada tahun t
 IND_{i,t} : Proporsi komisaris independen bank i pada tahun t
 BSIZE_{i,t} : Ukuran bank i pada tahun t
 AGE_{i,t} : Umur bank i pada tahun t
 MtBV_{i,t} : Market to book value bank i pada tahun t
 CEOWN_{i,t} : CEO ownership bank i pada tahun t
 e_{i,t} : Residual bank i pada tahun t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Statistik

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari seluruh variabel yang digunakan, baik variabel independen seperti ukuran dewan

komisaris (CSIZE) dan proporsi komisaris independen (IND), variabel kontrol seperti ukuran bank (BSIZE), umur bank (AGE), rasio market to book value (MtBV), dan kepemilikan CEO (CEOWN), maupun variabel dependen yaitu risiko insolvensi (Z-Risk) dan risiko idiosinkratik (IDO). Nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari masing-masing variabel selama periode 2007–2016 ditampilkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Model 1

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Z-Risk	194	0,002	0,058	0,019	0,011
CSIZE	194	0,693	2,197	1,540	0,377
IND	194	0,333	1,000	0,580	0,095
BSIZE	194	28,012	34,445	30,979	1,696
AGE	194	11,000	118,000	45,590	21,160
MtBV	194	0,303	4,693	1,432	0,906
CEO OWN	194	0,000	0,540	0,024	0,083
Valid N (listwise)	194				

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21

Tabel 2. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Model 2

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
IDO	131	0,022	0,220	0,073	0,035
CSIZE	131	0,693	2,197	1,562	0,372
IND	131	0,333	0,800	0,583	0,084
BSIZE	131	28,012	34,577	31,400	1,713
AGE	131	10,000	119,000	46,630	23,593
MtBV	131	0,065	4,693	1,329	0,883



CEO OWN	131	0,000	0,560	0,017	0,070
Valid N (listwise)	131				

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21

Tabel 1 dan Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam dua model penelitian. Model pertama bertujuan mengukur *insolvency risk* (Z-Risk) dengan jumlah observasi sebanyak 194 data, sedangkan model kedua mengukur *idiosyncratic risk* (IDO) dengan 131 data observasi.

Pada model pertama, nilai Z-Risk sebagai variabel dependen memiliki kisaran antara 0,0016 hingga 0,0582, dengan rata-rata sebesar 0,0189 dan standar deviasi 0,0108. Ukuran dewan komisaris (CSIZE) berkisar antara 0,6931 hingga 2,1972, dengan nilai rata-rata 1,5397. Sementara itu, proporsi komisaris independen (IND) memiliki nilai minimum 0,3333 dan maksimum 1,0000, dengan rata-rata sebesar 0,5801. Untuk variabel kontrol, ukuran bank (BSIZE) memiliki rata-rata 30,9791, umur bank (AGE) rata-rata 45,59 tahun, rasio market to book value (MtBV) sebesar 1,4319, dan kepemilikan CEO (CEOWN) rata-rata sebesar 2,37%.

Pada model kedua, nilai IDO sebagai variabel dependen berkisar antara 0,0223 hingga 0,2204, dengan rata-rata 0,0734 dan standar deviasi 0,0352. Ukuran dewan komisaris (CSIZE) dalam model ini memiliki rata-rata sedikit lebih tinggi yakni 1,5619, dan proporsi komisaris independen (IND) sebesar 0,5832. Adapun variabel kontrol menunjukkan bahwa BSIZE rata-rata sebesar 31,4002, umur bank (AGE) rata-rata 46,63 tahun, MtBV sebesar 1,3294, dan CEOWN rata-rata sebesar 1,67%.

Secara umum, penyajian statistik deskriptif ini memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data yang digunakan

dalam analisis risiko *insolvency* dan risiko idiosinkratik perusahaan, serta menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar perusahaan dalam hal struktur tata kelola dan karakteristik perusahaan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil uji regresi linier berganda pada hipotesis 1 dan 2 yang terdiri dari variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris (CSIZE) dan proporsi komisaris independen (IND) terhadap pengambilan risiko bank yang diukur dengan *insolvency risk* (Z-Risk) dan *idiosyncratic risk* (IDO), sehingga didapatkan hasil regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Model 1	Model 2	
Variabel Dependen	Z-Risk	IDO	Simpulan
CSIZE	-0,007** (0,032)	-0,03** (0,023)	Signifikan
IND	-0,019** (0,040)	-0,089** (0,020)	Signifikan
BSIZE	-0,00005 (0,930)	-0,0003 (0,902)	Tidak Signifikan
AGE	0,00008** (0,041)	0,0003** (0,048)	Signifikan
MtBV	-0,002** (0,027)	-0,009** (0,016)	Signifikan
CEOWN	0,003 (0,765)	0,039 (0,328)	Tidak Signifikan
Constant	0,048 (0,005)	0,208 (0,005)	-
R square	0,132	0,265	-

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21

**) : Signifikan pada level 5%

() : Angka signifikansi

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 3 diperoleh sejumlah temuan penting terkait pengaruh karakteristik tata kelola dan karakteristik bank terhadap pengambilan risiko bank, yang diukur melalui *insolvency risk* (Z-Risk) dan *idiosyncratic risk* (IDO). Pertama, ukuran dewan komisaris (CSIZE)



menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kedua jenis risiko, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi -0,007 pada model 1 dan -0,03 pada model 2 dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin rendah risiko yang diambil oleh bank. Oleh karena itu, pada penelitian ini terbukti, karena H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Kedua, proporsi komisaris independen (IND) juga berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan risiko bank, dengan nilai koefisien -0,019 (model 1) dan -0,089 (model 2) dengan tingkat signifikansi di bawah 5%, sehingga keberadaan komisaris independen mampu menekan kecenderungan bank dalam mengambil risiko yang tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian ini terbukti, karena H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Selanjutnya, variabel ukuran bank (BSIZE) menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan, yang berarti ukuran bank tidak memiliki hubungan yang berarti terhadap risiko yang diambil. Sementara itu, umur bank (AGE) dan market to book value (MtBV) sama-sama menunjukkan pengaruh negatif signifikan, yang menandakan bahwa semakin matang usia bank serta semakin tinggi nilai pasar relatif terhadap nilai buku, semakin rendah risiko yang diambil oleh bank. Di sisi lain, kepemilikan CEO (CEOWN) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap risiko, yang mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh CEO tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan pengambilan risiko.

Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) pada model 1 sebesar 13,2%, menunjukkan bahwa CSIZE dan IND menjelaskan pengaruh terhadap Z-Risk sebesar 13,2%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Pada model 2, nilai R^2 sebesar 26,5%, mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 26,5% variasi IDO, sedangkan 73,5% lainnya dipengaruhi

oleh faktor eksternal lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda terhadap sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007 hingga 2016, dengan total 194 data observasi pada model pertama dan 131 data observasi pada model kedua, diperoleh beberapa temuan penting yang mencerminkan peran tata kelola perusahaan dalam pengambilan risiko bank.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengambilan risiko bank, baik yang diukur melalui *insolvency risk* maupun *idiosyncratic risk*. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin rendah kecenderungan bank untuk mengambil risiko yang berlebihan. Hal ini mencerminkan peran penting dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen bank, sehingga mampu menekan perilaku pengambilan risiko yang tidak perlu.

Kedua, proporsi komisaris independen juga ditemukan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pengambilan risiko bank. Semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam struktur dewan, maka semakin rendah tingkat risiko yang diambil oleh bank. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kehadiran komisaris independen, yang bebas dari kepentingan internal perusahaan, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih hati-hati serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemegang saham



disarankan lebih selektif dalam menentukan anggota dewan komisaris, dengan mempertimbangkan jumlah anggota serta proporsi komisaris independen, mengingat keduanya terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan risiko bank. Kedua, bagi investor, informasi mengenai struktur dewan komisaris juga perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan investasi di sektor perbankan, karena struktur tersebut memengaruhi kecenderungan bank dalam mengambil risiko.

Terakhir, untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sampel tidak hanya pada sektor perbankan, namun juga mencakup perusahaan keuangan lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terkait pengaruh struktur dewan komisaris terhadap pengambilan risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Çam, S., Uzkaralar, Ö., & Borak, M. 2024. Idiosyncratic risk and market volatility: Threat or opportunity for returns? A study of Borsa Istanbul stocks. *Borsa Istanbul Review*, 24(4), 698–709.
- [2] Astami, E., Pramono, A. J., Rusmin, R., Cahaya, F. R., & Soobaroyen, T. 2024. Do family ownership and supervisory board characteristics influence audit report lag? A view from a two-tier board context. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 56.
- [3] Hunjra, A. I., Jebabli, I., Thrikawala, S. S., Alawi, S. M., & Mehmood, R. 2024. How do corporate governance and corporate social responsibility affect credit risk? *Research in International Business and Finance*, 67.
- [4] Kohler, Mattias. 2014. Which banks are more risky? The impact of business models on bank stability. *Journal of Financial Stability*, 18 (1), 1-18.
- [5] Chen, *et al.*, 2006. Does stock option-based executive compensation induce risk-taking? An analysis of the banking industry. *Journal of Banking and Finance*, 20(30), 915-945
- [6] Akbar, S. *et al.* 2017. Board strucure and corporate risk taking in the UK financial sector. *International Review of Financial Analysis*, 50(7), 101-110.
- [7] Pathan, S. 2009. Strong boards, CEO power and bank risk-taking. *Journal of Banking & Finance*, 33(7), 1340–1350.
- [8] Jensen, M. And Meckling, W. 1976. Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, p.:305-360
- [9] Sudana, I Made. 2015. *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik*. Edisi 2. Surabaya: Erlangga.
- [10] Claessens, S., Djankov, S., Fan, J., Lang, L. 1999. Expropriation of minority shareholders: evidence from East Asia. *Policy Research paper 2088. World Bank, Washington DC*.
- [11] Shleifer, A., and R. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52, 737-783.
- [12] Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Jakarta: Author.
- [13] Hartono, Jogyanto. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* Edisi ke 11. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- [14] Moscovici, S., & Zavalloni, M. 1969. The group as a polarizer of attitudes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 12(2), 125–135.
- [15] Fama, E. F. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. *Journal of Political Economy*, 88, 288-307. <https://doi.org/10.1086/260866>